

MENEROKA PERENCANAAN BAHASA DAN LITERASI DI INDONESIA

Elis Kurniasih *¹

Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

eliskurniasih62@gmail.com

Jaja Wilsa

Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia

jaja@ugj.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to describe language and literacy planning in Indonesia. The language planning under study is focused on planning the Indonesian language which is positioned as the state language and national language. While literacy is focused on reading-writing literacy. Language planning is an activity carried out by the government or an agency appointed by the government to develop, foster and protect the Indonesian language. In Indonesia this body is the Language Development and Development Agency, which is then shortened to Language Agency. This agency has a vision of realizing human beings with character and becoming the nation's self through Indonesian language and literature. Many efforts have been made to pursue this vision, one of which is through the National Literacy Movement (GLN). So this paper focuses on developing, fostering, and protecting the Indonesian language and its relation to literacy conditions in Indonesia.

Keywords: language planning, literacy, Indonesian.

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perencanaan bahasa dan literasi di Indonesia. Perencanaan bahasa yang diteliti difokuskan pada perencanaan bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Sedangkan literasi difokuskan pada literasi baca-tulis. Perencanaan bahasa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah atau badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia. Di Indonesia badan ini adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang kemudian disingkat menjadi Badan Bahasa. Badan ini memiliki visi terwujudnya insan berkarakter dan jadi diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan untuk mengejar visi ini, yang salah satunya adalah melalui Gerakan Literasi Nasional (GLN). Maka tulisan ini berfokus pada pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia serta kaitannya dengan kondisi literasi di Indonesia.

Kata Kunci: perencanaan bahasa, literasi, bahasa Indonesia

¹ Corresponding author

PENDAHULUAN

Perencanaan bahasa merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia badan ini dinamakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dikelola di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apa saja yang dilakukan badan ini? Sebelum kita melihat pekerjaan riil yang dilakukan badan ini, ada baiknya kita definisikan terlebih dahulu tentang perencanaan bahasa itu sendiri, agar secara teoritis kita bisa memahaminya. Kridalaksana (2011) mendefinisikan perencanaan bahasa adalah usaha untuk memperbaiki komunikasi bahasa dengan menciptakan subsistem-subsistem baru atau menyempurnakannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memakainya. Standardisasi peristilahan dalam bidang-bidang kehidupan adalah contoh perencanaan bahasa.

Terkait dengan bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, maka perencanaan bahasa akan berfokus pada pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dalam kedudukan seperti itu. Dalam keputusan Seminar Politik Bahasa Nasional 1999 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi negara, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan serta pemerintah, dan (4) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, serta (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Dalam menyokong, memperkuat, dan mempertahankan kedudukan yang istimewa seperti itu, maka diperlukan adanya perencanaan bahasa yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kerja berat seperti itu. Pemerintah telah membentuk atau menunjuk Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang selanjutnya disebut Badan Bahasa. Badan ini memiliki visi “terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Badan Bahasa memiliki misi sebagai berikut:

- meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya;
- meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan;
- meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- meningkatkan peran aktif diplomasi dalam internasionalisasi kebahasaan.

Untuk memperlancar misi itu, badan ini dilengkapi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- Pelaksanaan administrasi Badan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kondisi riil pelaksanaan perencanaan bahasa melalui badan bahasa tersebut? Bagaimana hubungannya dengan penguatan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Menurut catatan sejarah, Badan Bahasa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Secara berkala (bisa dalam hitungan tahun, atau dekade), diterbitkan buku pedoman penulisan ejaan. Kita mendapatkan gambaran tentang sejarah penulisan ejaan sebagai berikut:

- a. Pada 1901 Ejaan bahasa Melayu dibuat dengan huruf latin berdasarkan rancangan Ch. A. van Ophuijsen.
- b. Pada 1938 Ejaan Indonesia diinternasionalkan berdasarkan keputusan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama.
- c. Pada 1947 Ejaan Republik sesuai SK Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tanggal 19 Maret nomor 264/Bhg. A;
- d. Pada 1956 patokan baru peraturan ejaan praktis sesuai SK Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tanggal 19 Juli 1956 nomor 4487/S Konsep Ejaan yang

- disempurnakan sesuai SK Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tanggal 19 September 1967 nomor 062/1967;
- e. Pada 1972 pengesahan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 03/A.1/72, yang didukung oleh Kepres No. 57 tahun 1972. Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Pedoman umum Ejaan yang Disempurnakan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Oktober 1972 nomor 156/P/1972;
 - f. Pada 1988 Pedoman Umum EYD edisi kedua sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0543a/U/1987 tanggal 9 September 1987;
 - g. Pada 2009 Pedoman Umum EYD edisi ketiga sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 46 tahun 2009.
 - h. Pada 2015 Pedoman Umum EYD diganti dengan PUEBI sesuai dengan Permendikbud No. 50 tahun 2015.

Adapun tujuh nama ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku yaitu Ejaan van Ophuijsen, Ejaan Republik, Ejaan Pembaharuan, Ejaan Melindo, Ejaan Baru, EYD, dan PUEBI.

Perubahan-perubahan itu terjadi seiring sejarah, dan sesuai zamannya yang berlaku. Bahkan Badan Bahasa itu sendiri berubah nama seiring perubahan zaman. Badan Bahasa berdiri pada tahun 1930, pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Belum diberi nama apa lembaga itu, namun sekelompok sarjana bahasa telah melaksanakan kerja nyata di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia.

Menginjak tahun 1948, yakni tiga tahun setelah Indonesia merdeka, badan ini diberi nama Balai Bahasa. Pada tahun 1952 berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya. Tahun 1959 menjadi Lembaga Bahasa. Tahun 1966 berubah lagi menjadi Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Tahun 1969 menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Tahun 1974 berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tahun 2000 menjadi Pusat Bahasa. Terakhir, tahun 2010 sampai sekarang, menjadi Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Sekedar contoh perubahan, pada tulisan ini akan dideskripsikan perubahan dari EYD (1972) ke PUEBI (2015). Perubahan tersebut sebagai berikut. Perubahan penggunaan EYD menjadi PUEBI telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun latar belakang perubahan tersebut antara lain :

1. Adanya Kemajuan dalam Berbagai Ilmu Kemajuan yang terjadi dalam Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas baik secara tulisan maupun lisan.
2. Memantapkan Fungsi Bahasa Indonesia Ejaan dalam bahasa Indonesia perlu

disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Perubahan ejaan yang terjadi tidak mengubah keseluruhan isi dari EYD.

Perbedaan yang mendasar dari perubahan EYD dengan PUEBI yaitu :

1. Penambahan huruf vokal diftong ei, dalam EYD hanya ada tiga yaitu ai, au, dan ao.
2. Pada PUEBI huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan sedangkan EYD hanya penulisan nama orang tidak dengan julukan.
3. Pada PUEBI huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring sedangkan pada EYD tidak dipakai.
4. Pada PUEBI partikel pun tetap ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai sedangkan dalam EYD partikel yang sudah lazim ditulis serangkai.
5. Pada PUEBI penggunaan bilangan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, sedangkan pada EYD tidak diatur.
6. Penggunaan titik koma (;) pada EYD digunakan tanpa penggunaan kata dan, sedangkan dalam PUEBI penggunaan titik koma (;) tetap menggunakan kata dan.
7. Penggunaan tanda titik koma (;) pada PUEBI dipakai pada akhir perincian berupa klausa, sedangkan pada EYD tidak diatur.
8. Penggunaan tanda hubung (-) pada PUEBI tidak dipakai di antara huruf dan angka, jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf, sedangkan pada EYD tidak diatur.
9. Tanda hubung (-) pada PUEBI digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan, sedangkan pada EYD tidak diatur.
10. Penggunaan tanda kurung [()] dalam perincian pada EYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah, sedangkan pada PUEBI tidak.
11. Penggunaan tanda elipsis (...) dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, sedangkan dalam PUEBI tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran.

Selain pedoman ejaan, tentu saja banyak usaha lain yang dilakukan Badan Bahasa. Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah juga merupakan usaha Badan Bahasa untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini. Sejalan dengan mendesaknya teknologi, KBBI juga dimodifikasi dengan diterbitkannya KBBI Daring. Kini kita tidak lagi direpotkan dengan membuka lembar per lembar dalam kamus tercetak, melainkan tinggal menekan tombol *keyboard* untuk mencari makna kata tertentu.

Selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional? Secara langsung maupun tidak langsung, upaya Badan Bahasa dalam melaksanakan perencanaan bahasa adalah demi menguatkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Dalam acara-acara kenegaraan yang menghendaki komunikasi lisan, para negarawan banyak mengambil pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang telah

dimantapkan melalui buku pedoman itu. Pun demikian dalam penggunaan bahasa tulis, di mana penggunaan ejaan yang benar banyak berpedoman pada tata tulis ejaan yang telah dibakukan itu, yakni melalui EYD atau PUEBI. Maka, menggunakan bahasa secara demikian, secara langsung atau tidak telah memartabatkan bahasa Indonesia, yang berkedudukan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional itu.

Halo Literasi

Sejalan dengan perkembangan zaman, di mana informasi berseliweran dalam waktu singkat (bahkan dalam hitungan detik), maka dipandang perlu adanya gerakan literasi. Alasannya, kemajuan zaman meniscayakan manusia melek baca-tulis. Membaca pesan we a, misalnya, merupakan bagian dari kegiatan literasi, dan mendorong kita semua sebagai manusia Indonesia, sekaligus juga warga dunia, sadar atau tidak sadar, untuk menjadi masyarakat literat. Maka adanya gerakan literasi nasional (GLN), merupakan upaya pemerintah mendorong warganya untuk menjadi masyarakat literat. Tentu saja tidak tanpa tantangan karena secara umum masyarakat kita masih kental dengan budaya lisan. (Literasi erat kaitannya dengan budaya baca-tulis, bukan budaya lisan).

Masyarakat Indonesia sesungguhnya masih berada dalam tegangan antara budaya lisan dan budaya tulis, antara kelisanan dan keberaksaraan (Teeuw, 1994). Masyarakat kita lebih gemar menyetel tayangan video youtube, karena tayangan ini lebih kental dengan budaya omong-omong, notabene sebagai budaya lisan. Hal itu diperkuat dengan teknologi audio, atau audio visual yang makin merebak. Sebagai contoh, alat pemutar musik (kaset, tape recorder, radio, televisi) lebih laku dibandingkan dengan buku. Buku, semurah apa pun, tidak banyak diminati, walaupun dikarang pengarang terkenal. Sedangkan kaset, tape recorder, radio, televisi, dan kini ditambah dengan ponsel, gawai, dan laptop, sangat laris manis. Terutama ponsel, mulai dari anak batita, anak baru bisa jalan, sampai kakek-nenek tua bangsa, lebih akrab dengan ponsel, dan berusaha memilikinya walaupun dengan harga mahal, lebih mahal dari buku termahal. Mengapa? Karena ponsel lebih banyak dimuati fitur audio. Orang bisa menyetel musik, mengirim pesan suara, ber-*video call*, nonton film, dan lain-lain yang semuanya merupakan indikator budaya lisan, budaya omong-omong. Memang, tersedia juga alat literasi baca tulis. Toh kini koran dan majalah cetak sudah digantikan oleh koran dan majalah digital. Kapan pun dan di mana pun orang bisa membaca berita, membaca cerpen, novel, melalui ponsel. Namun, secara umum orang membeli ponsel bukan untuk kegiatan membaca produk-produk itu. Bagaimana dengan Anda? Untuk apa Anda membeli ponsel?

Maka, gerakan literasi, apa pun namanya, masih terkendala dengan budaya lisan. Orang mau membaca dan menulis hanya karena terdorong oleh tugas-tugas saat mengikuti pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi. Anak-anak sekolah baru akan membaca cerpen, puisi, menulis resensi, menulis makalah, dan lain-lain karena

mendapatkan tugas dari guru Bahasa Indonesia. Demikian pun di perguruan tinggi. Mahasiswa baru mau membaca karena tugas-tugas kuliah dari dosennya. Dan baru menulis secara serius, karena tugas akhir yang harus dikerjakannya sebagai prasyarat untuk bisa lulus kuliah. Itu pun kadang-kadang, untuk gampangnya, menyuruh orang lain.

Tentu saja kita tidak boleh putus asa. Adanya kendala bukan berarti kita tidak boleh berbuat apa-apa. Budaya literasi tetap harus kita tumbuhkan, bagaimanapun caranya. Meminjam istilah guru lingkungan hidup, “jangan salahkan siapa yang mengotori, ambillah sampah sekecil apapun dan buanglah pada tempatnya”. Kalau digeneralisasikan pada budaya literasi, “jangan tuduh siapa yang bersalah, mulailah dengan membaca dan menulis, sekecil apa pun”.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Teeuw. 1994. *Indonesia Antara Kelisasan dan Keberaksaraan*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Dita Pertiwi. 2018. “Perubahan EYD (Ejaan yang Disempurnakan) Menjadi PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). <https://medium.com/@TERRAI TB/perubahan-eyd-ejaan-yang-disempurnakan-menjadi-puebipedoman-umum-ejaan-bahasaindonesia-a51c121f3329> (diakses pada tanggal 15 Juni 2022).
- Kridalaksana H, Budaya LF. *Sendi-sendi Ilmiah bagi Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Laboratorium Leksikologi dan Leksikografi. 2010.
- Sudaryanto S, Zultiyanti Z, Yumartati A, Saputri FM, Nurmalitasari N. “Teori perencanaan bahasa Lauder & Lauder dan aplikasinya dalam konteks bahasa Indonesia”. *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusastraan Indonesia*. 2019;3(2):66-75.
- Syahputra E, Alvindi A. “Berlakunya Perubahan Ejaan yang disempurnakan (EYD) menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)”. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 2022 Mar 4;3(1):160-6.